

Transfer Dana Desa dan Dinamika Makro Ekonomi Daerah terhadap Peningkatan Status Desa Berkembang di Provinsi Maluku Utara

Muhammad Fajri^{1*}, Abdul Chalid Ahmad², Rizal Rahman Teapon³

^{1*,2,3} Magister Ekonomi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

INFO ARTIKEL

JER

Jurnal Economic Resources

ISSN: 2620-6196

Vol. 8 Issues 2 (2025)

Riwayat Artikel:

Diterima – Agustus 17, 2025

Direvisi – Agustus 25, 2025

Diterima – Agustus 27, 2025

Email Korespondensi:

jendrallegiun@gmail.com

Kata Kunci:

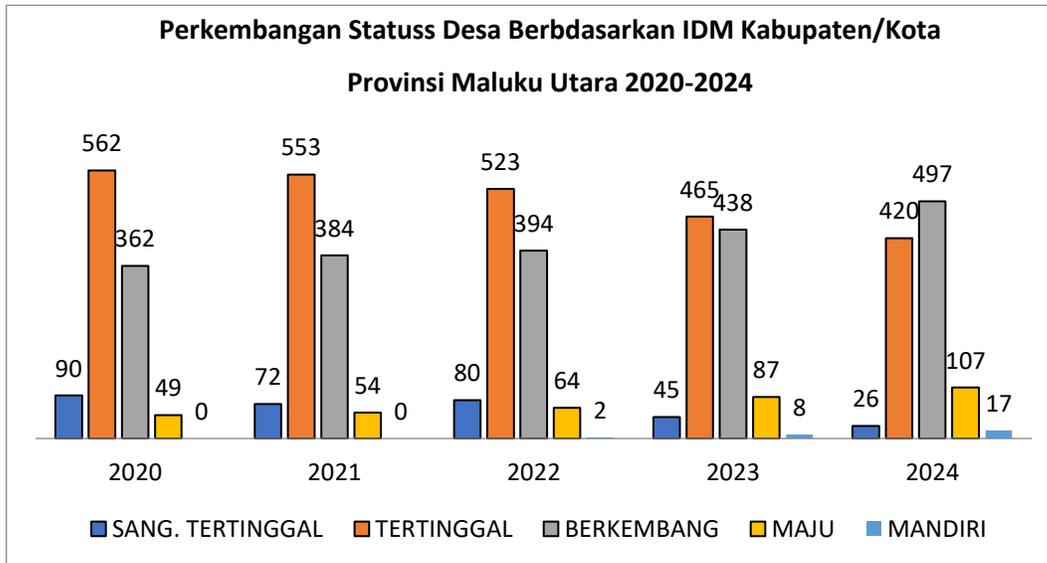
Transfer Dana Desa, Desa Berkembang, Panel Data

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer Dana Desa terhadap peningkatan status Status Desa Berkembang (IDM). Khususnya pada desa berkategori berkembang di Provinsi Maluku Utara dengan mempertimbangkan variabel makroekonomi lainnya, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal, dan Tingkat Kemiskinan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya capaian pembangunan desa di Maluku Utara meskipun alokasi Dana Desa terus meningkat sejak 2015. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel terhadap 9 kabupaten/kota selama periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Dana Desa, IPM, dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah desa berkembang. Dana Desa dan IPM berpengaruh positif, sementara kemiskinan berpengaruh negatif terhadap jumlah desa berkembang. Sementara itu, PAD, PDRB, dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Namun secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap jumlah desa berkembang. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi fiskal yang tepat sasaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan desa, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan bottom-up, pemerintah Indonesia menempatkan desa sebagai pusat strategi pembangunan, salah satunya lewat kebijakan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana ini menjadi instrumen fiskal utama untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ekonomi lokal. Dalam rangka mengukur kemajuan pembangunan desa secara sistematis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperkenalkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendes PDPTT Nomor 2 Tahun 2016. Melalui IDM, status desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu: Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal berdasarkan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan. Status desa berkembang menjadi indikator penting yang menandai bahwa sebuah desa telah memiliki infrastruktur dasar, kapasitas kelembagaan, serta aktivitas ekonomi produktif.



Gambar 1. Status Desa Berkembang Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber: DPMD Provinsi dan P3PD Provinsi Maluku Utara yang diolah oleh penulis

Provinsi Maluku Utara, sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis dan kapasitas fiskal yang kompleks, menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan data IDM, meskipun Dana Desa telah disalurkan sejak tahun 2015, peningkatan status desa di wilayah ini masih belum merata. Tercatat hingga tahun 2024, dari 1.063 desa di provinsi ini, hanya 17 desa yang telah mencapai status mandiri, dan sebagian besar masih berada dalam kategori berkembang atau lebih rendah. Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol, namun tujuh kabupaten/kota lainnya belum memiliki satu pun desa mandiri.

Sebagian besar penelitian terdahulu tidak secara eksplisit mengkaji konteks wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara yang memiliki tantangan geografis dan struktural yang khas. Studi yang dilakukan Halim dan Taryani (2023) berfokus pada Nusa Tenggara Timur, sementara Elfahdi et al. (2021) meneliti Kabupaten Belitang Timur. Sejauh ini belum ada studi komprehensif yang meneliti hubungan Dana Desa dengan IDM dalam konteks geografis kepulauan Indonesia timur.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji hubungan antara Dana Desa dan peningkatan IDM. Penelitian oleh Halim dan Taryani (2023) menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan IDM sangat dipengaruhi oleh kecepatan penyaluran dan besaran serapan anggaran. Sementara itu, studi oleh Elfahdi et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana sebagai determinan utama keberhasilan pembangunan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial, belum mempertimbangkan peran variabel makro seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal (BM), serta tingkat kemiskinan sebagai faktor yang turut mempengaruhi status IDM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyusun suatu model empiris yang mampu menjelaskan pengaruh Dana Desa dan variabel-variabel makroekonomi lainnya terhadap peningkatan status IDM di Provinsi Maluku Utara. Dengan pendekatan kuantitatif yang terukur, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis bagi pemerintah daerah dan nasional dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara lebih efektif dan berkeadilan.

Dana Desa dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi

Dana Desa merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan melalui transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada desa. Menurut Kementerian Keuangan (2022), Dana Desa diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Dana Desa memiliki potensi sebagai instrumen redistribusi untuk mendorong pertumbuhan inklusif terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya investasi publik, termasuk dalam bentuk Dana Desa, dalam menciptakan modal manusia dan infrastruktur yang mendukung produktivitas jangka panjang (Romer, 1994). Oleh karena itu, Dana Desa bukan hanya memiliki dimensi fiskal tetapi juga strategis dalam membentuk fondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan dan kemandirian desa. IDM terdiri dari tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Setiap dimensi mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan kondisi objektif desa dalam berbagai aspek kehidupan. Status desa dalam IDM diklasifikasikan menjadi lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menilai tingkat kemandirian dan kemajuan pembangunan desa. IDM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Masing-masing dimensi tersebut terdiri dari sejumlah indikator yang dikalkulasi secara komposit untuk menghasilkan klasifikasi status desa. Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, status desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu: (1) desa sangat tertinggal, (2) desa tertinggal, (3) desa berkembang, (4) desa maju, dan (5) desa mandiri. Klasifikasi ini bersifat dinamis dan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. IDM juga menjadi referensi utama dalam penentuan prioritas alokasi Dana Desa dan intervensi pembangunan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan, termasuk pembiayaan transfer ke desa. Daerah dengan PAD tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mendukung pembangunan desa secara komplementer terhadap Dana Desa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. PAD terdiri dari empat sumber utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah serta kemampuannya dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

PDRB sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah juga berpengaruh terhadap iklim pembangunan desa, karena semakin tinggi aktivitas ekonomi regional, semakin besar peluang desa untuk terlibat dalam kegiatan

ekonomi produktif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam berbagai sektor ekonomi, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Sebagai ukuran makroekonomi, PDRB digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, struktur ekonomi, dan kontribusi sektor-sektor terhadap pembangunan (BPS, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator pembangunan manusia yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Peningkatan IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas desa dalam memanfaatkan Dana Desa secara efektif. Desa dengan IPM yang tinggi cenderung lebih responsif terhadap kebijakan pembangunan dan inovasi lokal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam memperluas capaian-capaian dasar manusia. IPM mencerminkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir), akses terhadap pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan). IPM dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional dan daerah (BPS, 2023).

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Secara konseptual, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik dari sisi pangan, pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal yang layak. Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yakni mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dalam konteks pembangunan desa, tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator yang saling memengaruhi dengan dimensi ketahanan ekonomi dan sosial dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Desa-desanya dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap layanan dasar, infrastruktur yang minim, serta tingkat produktivitas masyarakat yang rendah, sehingga memperlambat proses transformasi menuju status desa yang lebih maju atau mandiri (Kementerian Desa, 2022).

METODE

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data panel yaitu data time series yang diambil dari tahun 2020-2024 dan data cross-section untuk 9 Unit kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Adapun model panel data dalam penelitian ini dikembangkan dari beberapa model penelitian empirik dari Sihombing dan Purwanti (2022); Ifitah dan Wibowo (2022); serta Purnomo dan Utmai (2024). Ketiga model ini kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{LnIDM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDD}_{it} + \beta_2 \text{LnPAD}_{it} + \beta_3 \text{LnPDRB}_{it} + \beta_4 \text{LnIPM}_{it} + \beta_5 \text{LnBM}_{it} + \beta_6 \text{LnMISK}_{it} + \text{eit} \quad (3.1)$$

IDMit adalah Indeks Desa Mandiri kabupaten/kota ke-i pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; DDit adalah Realisasi Dana Desa kabupaten/kota ke-i pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; PADit adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota ke-i pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; PDRBit adalah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Harga Konstan) kabupaten/kota ke-i pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; IPMit adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota ke-i pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; BMit adalah Realisasi Belanja Modal (BM) kabupaten/kota ke-i pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; MISKINit adalah Penduduk Miskin (MISK) kabupaten/kota ke-I pada tahun t di Provinsi Maluku Utara; β_0 adalah Konstanta; β_1 dan β_6 adalah Koefisien Regresi; eit adalah error term; i adalah unit cross-section di mana: $i = 1, 2, \dots, 9$ adalah sebanyak sembilan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara; t adalah unit time series di mana: $t = 2020, \dots, 2024$.

Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu pendekatan Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Madany et al., 2022). Untuk menentukan model mana yang akan digunakan dari ketiga pendekatan tersebut maka diperlukan pengujian model panel data melalui Uji Chow, Uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (Uji LM). Selain juga dilakukan pengujian Asumsi Klasik melalui uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Hasil estimasi model panel data ini kemudian dilakukan pengujian statistik melalui Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Uji Parsial (Uji Statistik t), dan Koefisien Determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Data Panel

Pengujian model data panel pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews. Langkah awal dalam analisis pemilihan model data panel yaitu dilakukan estimasi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). (Johan, 2021)

Tabel 1. Hasil Uji Data Panel Model

Jenis Uji	Model Status Desa Berkembang		
Uji Chow	F-Statistic	Prob.	Model Terpilih
Cross-section F	7.1253	0.0000*	FEM
Uji Hausman	Chi-Sq.Statistic	Prob.	Model Terpilih
Cross-section random	2.0587	0.9142*	REM
Uji langrange multiplier (LM)	Chi-Sq.Statistic	Prob.	Model Terpilih
Cross-sectionrandom	22.3326	0.0000*	REM

*Keterangan: *) Nilai Prob > 0,05*

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 4.1 nilai probabilitas cross-section F lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0000 < 0,05$. Interpretasi hasil Uji Chow model terpilih adalah fixed effect model (FEM). Hasil Uji Hausman pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari 0,05 yaitu $0,9142 > 0,05$, Berdasarkan hasil Uji Hausman maka diperoleh bahwa random effect model lebih baik jika dibandingkan dengan fixed effect model, REM terpilih.

Hasil uji Langrange Multiplier (LM) pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0000 < 0,05$, berdasarkan hasil uji Langrange Multiplier (LM) maka diperoleh bahwa random effect model lebih baik jika dibandingkan dengan common effect model, karena REM terpilih maka dapat dikatakan jika model regresi tidak terjadi Omitted Variable Bias, karena REM terpilih.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil pengujian Multikolinearitas

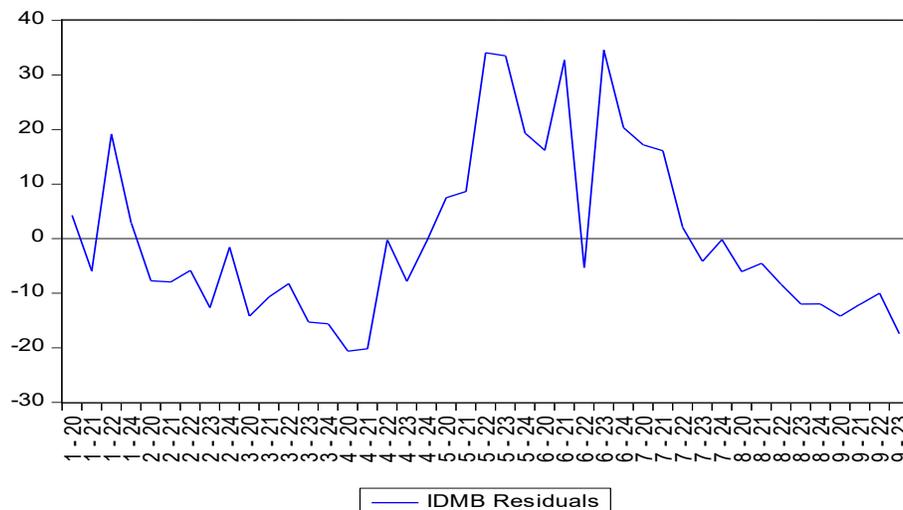
Variable	DD	PAD	PDRB	IPM	BM
DD	1.000000	0.449711	-0.086938	-0.098570	-0.007218
PAD	0.449711	1.000000	0.328337	0.275763	0.296028
PDRB	-0.086938	0.328337	1.000000	0.914330	0.033859
IPM	-0.098570	0.275763	0.914330	1.000000	-0.065358
BM	-0.007218	0.296028	0.033859	-0.065358	1.000000
MISKIN	0.672885	0.401387	0.365775	0.259671	0.096423

Sumber: Pengolahan data Eviews (2025)

Koefisien kolerasi variabel DD dan PAD sebesar $-0.449711 < 0,85$, Koefisien kolerasi DD dan PDRB sebesar $-0.086938 < 0,85$ dan koefisien kolerasi DD dan IPM sebesar $-0.098570 < 0,85$ dan koefisien kolerasi DD dan BM sebesar $-0.007218 < 0,85$ dan koefisien kolerasi MISKIN dan BM sebesar $0.096423 < 0,85$ Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Kriteria keputusan dilihat dari grafik residual. Apabila signifikan atau melebihi batas (500 dan -500), maka dikatakan terkena heteroskedastisitas, apabila tidak signifikan atau lebih kecil dari (500 dan -500), berarti dikatakan bebas heteroskedastisitas. Berikut output pengujian heteroskedastisitas dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Pengolahan data Eviews (2025)

Dari grafik residual dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500). Artinya varian residual dapat dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas atau lolos dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Regresi data panel

LnDB _{it} = variable dependen			
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Konstanta	-282.8243	-3.3102	0.0021
LnDD _{it}	0.5520	7.1922	0.0000*
LnPAD _{it}	-0.0108	-0.1913	0.8493
LnPDRB _{it}	0.0007	0.1049	0.9170
LnIPM _{it}	4.7909	2.6462	0.0120*
LnBM _{it}	-0.0041	-0.2350	0.8155
LnMISKIN _{it}	-5.8969	-5.6698	0.0000*
Adj.R-squared		0.6411	
F-statistic		13.5032	
Prob(F-statistic)		0.0000*	
Durbin-Watson stat		2.2957	

*Keterangan: *) Signifikan 5%. Sumber: diolah (Eviews)*

Persamaan regresi data panel yang terbentuk dengan pendekatan Random effect model adalah sebagai berikut:

$$LnDB_{it} = -282.824 + 0.5520LnDD_{it} - 0.0107LnPAD_{it} + 0.00662LnPDRB_{it} + 4.7909LnIPM_{it} - 0.0040LnBM_{it} - 5.8968LnMISKIN_{it}$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar -282,824 hanya bersifat teoritis, karena pada praktiknya tidak mungkin seluruh variabel independen bernilai nol. Variabel Dana Desa (DD) berpengaruh positif signifikan, yang berarti peningkatan Dana Desa mampu mempercepat pembangunan desa, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan, sehingga kontribusi fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi makro belum langsung tercermin pada pembangunan desa di Maluku Utara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat berperan penting dalam mendorong desa menuju status berkembang. Sementara itu, Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh signifikan karena alokasinya masih terfokus pada perkotaan. Variabel kemiskinan justru berpengaruh negatif signifikan, mempertegas bahwa tingginya angka kemiskinan menjadi hambatan utama pembangunan desa.

Secara simultan, Dana Desa dan IPM menjadi pendorong utama peningkatan status desa berkembang, sedangkan kemiskinan menjadi faktor penghambat terbesar. Adapun PAD, PDRB, dan Belanja Modal masih menunjukkan peran yang terbatas dalam mendorong perkembangan desa di Provinsi Maluku Utara.

Cross-section Random Effect Model Transfer Dana Desa terhadap status Desa berkembang

Pada tabel 4 menunjukkan hasil estimasi model yang menganalisis disparitas transfer dana desa antara kelompok kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Estimasi ini menggunakan nilai cross-section effect (CR-Effect). Koefisien CR-Effect pada sembilan kabupaten/kota semua bernilai negatif untuk Model transfer dana desa, baik secara parsial maupun total Tabel 4

Tabel 4. Cross-section Random Effect

No	Kabupaten/Kota	Nilai
1	Halmahera Barat	4.7185
2	Halmahera Tengah	-6.7097
3	Kepulauan Sula	-1.2036
4	Halmahera Selatan	-9.2876
5	Halmahera Utara	1.9408
6	Halmahera Timur	1.8553
7	Morotai	5.8623
8	Taliabu	-8.0670
9	Tidore Kepulauan	-1.2443
Total		-12.1351
Rata-Rata		-1.3483

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, 2025.

Hasil analisis menunjukkan adanya penurunan disparitas transfer Dana Desa antar kabupaten/kota di Maluku Utara sebesar 12,13% atau rata-rata 1,34% per tahun. Penurunan terbesar terjadi di Halmahera Selatan (-9,3%), Pulau Taliabu (-8,07%), dan Halmahera Tengah (-6,71%), sedangkan yang terkecil di Kepulauan Sula (-1,20%) dan Kota Tidore Kepulauan (-1,24%). Sebaliknya, disparitas meningkat di beberapa daerah, terutama Morotai (5,86%) dan Halmahera Barat (4,72%), dengan kenaikan terendah di Halmahera Utara (1,94%) dan Halmahera Timur (1,86%).

Pembahasan

Penurunan Disparitas Transfer Dana Desa: Indikasi Positif Desentralisasi Fiskal

Hasil estimasi dengan nilai CR-Effect negatif pada sebagian besar kabupaten/kota di Maluku Utara menunjukkan adanya penurunan disparitas transfer Dana Desa. Temuan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah dan menciptakan distribusi keuangan yang lebih adil (Musgrave & Musgrave, 1989; Shah, 2007). Penelitian Sihaloho dan Putra (2021) juga menegaskan bahwa peningkatan Dana Desa di wilayah tertinggal mampu mempersempit kesenjangan fiskal horizontal. Dalam konteks Maluku Utara, penurunan signifikan di Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Tengah mencerminkan efektivitas kebijakan afirmatif pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di daerah kepulauan dan tertinggal.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Status Desa Berkembangan Di Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap Status Desa Berkembang (SDB) di Maluku Utara periode 2020–2024 (prob. 0,000 < 0,05). Temuan ini sejalan dengan pendekatan *community-based development* yang menekankan pentingnya transfer fiskal langsung ke desa untuk memperkuat kapasitas lokal (Mansuri & Rao, 2013).

Penelitian sebelumnya (Kurniawan et al., 2021; Nurhadi & Oktaviani, 2022) serta laporan Kemendesa PDTT (2023) juga menegaskan peran Dana Desa dalam meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan wilayah, Dana Desa berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus mengurangi kesenjangan regional (Todaro & Smith, 2020). Dengan demikian, Dana Desa dapat dikatakan sebagai instrumen fiskal efektif dalam mempercepat pembangunan desa dan memperkuat daya saing wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Status Desa Berkembangan Di Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Status Desa Berkembang (SDB) di Maluku Utara periode 2020–2024 (prob. 0,8493 > 0,05).

Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah kepulauan, di mana PAD relatif kecil dan lebih banyak dialokasikan pada belanja rutin dibanding pembangunan desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Yuliana & Santosa (2021) serta Lestari & Nugroho (2023) yang menegaskan lemahnya kontribusi PAD pada pembangunan desa, terutama di daerah yang bergantung pada transfer pusat. Dalam konteks desentralisasi fiskal asimetris, pembangunan desa di Maluku Utara lebih ditopang oleh Dana Desa dibanding PAD (World Bank, 2022; Bappenas, 2024). Dengan demikian, PAD belum menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan SDB, sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan desa melalui optimalisasi Dana Desa menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Status Desa Berkembang Di Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Status Desa Berkembang (SDB) di Maluku Utara periode 2020–2024 (prob. 0,9170 > 0,05). Meskipun PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional, fenomena *growth without equity* menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak otomatis merata hingga ke desa. Temuan ini sejalan dengan Putra & Maulani (2021) serta Fadli & Rosdiana (2022), yang menegaskan bahwa PDRB di daerah dengan ketimpangan struktural tinggi lebih banyak didorong oleh sektor eksklusif seperti pertambangan atau perdagangan besar, yang kontribusinya minim bagi desa. Laporan Kemendesa PDTT (2023) juga menekankan bahwa ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa lebih dipengaruhi oleh intervensi langsung seperti Dana Desa ketimbang indikator makroekonomi.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Status Desa Berkembang Di Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Status Desa Berkembang (SDB) di Maluku Utara periode 2020–2024 (prob. 0,0120 < 0,05). Hal ini sejalan dengan pendekatan kapabilitas Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan ditentukan oleh peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak komponen utama IPM yang sekaligus berkorelasi erat dengan dimensi SDB. Temuan ini diperkuat oleh Prasetyo & Indrawati (2021) serta Iskandar & Halim (2022), yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM mendorong akselerasi pembangunan desa melalui penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan produktivitas masyarakat. Laporan Bappenas (2023) juga menegaskan pentingnya integrasi IPM dengan agenda pembangunan desa, khususnya di wilayah kepulauan tertinggal seperti Maluku Utara.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Status Desa Berkembang Di Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Status Desa Berkembang (SDB) di Maluku Utara periode 2020–2024 (prob. 0,8155 > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal kabupaten/kota belum secara langsung menjangkau kepentingan desa, karena lebih terpusat pada wilayah perkotaan atau ibukota kabupaten (Nurhayati & Ramadhan, 2021). Efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi tata kelola, transparansi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan desa (Latifah & Hakim, 2022). Dalam konteks wilayah kepulauan, distribusi belanja modal yang tidak merata memperlemah dampaknya terhadap pembangunan desa (World Bank, 2021). Laporan Bappenas (2024) juga menekankan bahwa kualitas belanja, bukan sekadar jumlah, yang menentukan relevansinya terhadap kebutuhan desa. Oleh karena itu, belanja modal di Maluku Utara belum

menjadi instrumen efektif peningkatan SDB, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih partisipatif, berkeadilan spasial, dan berpihak pada desa.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Status Desa Berkembangan Di Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Status Desa Berkembang (SDB) di Maluku Utara periode 2020–2024 (prob. $0,000 < 0,05$). Tingginya kemiskinan membatasi akses masyarakat desa terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sehingga melemahkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai dimensi utama SDB (Sen, 1999). Temuan ini sejalan dengan Hastuti et al. (2021) yang menyatakan bahwa desa dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung stagnan dalam pembangunan. Dalam konteks Maluku Utara, kemiskinan diperparah oleh keterisolasian geografis, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan fiskal (Yusuf & Lestari, 2022). Bappenas (2023) menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan, melalui program seperti BLT Dana Desa dan pemberdayaan ekonomi lokal, merupakan prasyarat peningkatan status desa.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan positif terhadap Status Desa Berkembang (SDB), sementara tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh terhadap SDB, menegaskan pentingnya strategi pembangunan desa yang terintegrasi, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., dan Nurhasanah, N. (2019). "The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District". *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 125–136.
- Amir, A., Junaidi dan Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). "Dampak Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah". *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 91–106.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: STIE-YKPN
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Kemiskinan Desa dan Kota Tahun 2020-2024* (persen). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2021). *Laporan Pembangunan Desa 2020–2021*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS. (2024). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2020–2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Gujarati, D. N., & Dawn C. Porter. (2008). *Basic Econometric* (fifth edition). New 11 York: MCGraw-Hill Inc.
- Huda, M., & Firmansyah, D. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2567>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., dan Nasutian, M. A. (2018). "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Kementerian Desa. (2021). *Dana Desa Kabupaten Kota Tahun 2020-2024 : Sistem Informasi Desa*.
- Kementerian Desa. (2021). *Status Desa Berkembang Kabupaten Kota Tahun 2016-2020*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Buku Saku Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Khoiriah, S., dan Meylina, U. (2017). "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Kurniawan, A., Sari, M., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 9(2), 115–127.
- Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 8(2), 1-15.
- Martono, S., Suryanto, & Putra, Y. (2023). Transfer fiskal dan ketimpangan pembangunan desa: Analisis panel di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 24(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jepi.v24i1.47382>
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta.
- Rafsanzani, H., Supriyono, B., dan Suwondo. (2013). "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa dalam Perencanaan
- Ristanti, Y. D., dan Handoyo, E. (2017). "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah". *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Ritonga, A., Handra, H., dan Andrianus, F. (2021). "Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat". *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277.
- Rosalinda, O. (2014). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya*, 10 (1), 1–14.
- Soleh, A. (2022). Efektivitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan: Pendekatan empiris. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 17(3), 201–214.
- Susanti, R., & Malik, F. (2020). Peran belanja modal dan PAD terhadap pembangunan daerah kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Perencanaan Pembangunan*, 15(2), 67–82.
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., dan Harahap, R. H. (2020). "Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli The Role of Village Funds in Developing Village Index North Sumatra Province". *Jurnal Online Universitas Medan Area*. 9(2), 438–446.
- Triyono, Achyani, F., dan Arfiansyah, M. A. (2019). "The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District)". *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 4, No 2 (2019), 118–135.
- Wahyuddin, Ramly, A. R., Djalil, M. A., dan Indriani, M. (2020). "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuala, Kab Nagan Raya". *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 1–12. 6
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (edisi pertama)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2021). *Indonesia rural development and village fund policy review*. Washington, DC: The World Bank.
- Zuliyah, S. (2010). "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah". *Journal of Rural and Development*, 1(2), 151–160.